

ISSN : 2302 - 1590
E-ISSN : 2460 – 190X



ECONOMICA

Journal of Economic and Economic Education Vol.3 No.2 (146 - 160)

ANALISA PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BERGULIR SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PROGRAM PNPM-MP DI KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Yulihardi

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia dan
Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP- PGRI Sumbar
Jl. Gunung Pangilun No.1, Padang Sumatera Barat
Email: yulihardibahar@yahoo.com

submitted: 2015.01.26 reviewed: 2015.02.27 accepted: 2015.04.26

<http://dx.doi.org/10.22202/economica.2015.v3.i2.252>

Abstract

V Koto Timur sub-district of Padang Pariaman, revolving funds by the women's savings and loans to Group Activity Management Unit and analyzing the effect of channeling funds to changes in income. The research method with a descriptive approach to the analysis based on the technical guidance of the PNPM-MP by the Directorate General of Community and Village Year 2008 and regression. The population in this study is the whole group SPP in District V East Koto with 74 members on 3 Nagari, with a sample of 30 people. Results of socialization that understanding of the goals and objectives of the PNPM-MP as much as 63.33%, while 36.67% of them do not understand, from the aspect of the use of funds 70% of the group is the recipient of poor households (RTM) and 30% are not poor households (non-RTM). 66.67% of the group receiving states can increase revenues increased 33.33% said no. Refunds showed 83.33% and 16.67% current substandard. Members who obtained a loan (SPP), 80% stated that their efforts receive guidance / assistance of the technical team and the facilitator. There was no significant effect of the amount of lending revolving fund SPP in increased revenues members of the group. Suggested improvements in the implementation of programs in the field, especially in the dissemination to the public, especially to members of the group and that the board is more selective and better yet in selecting loan recipients in assessing the feasibility of the business.

Abstrak

Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, penyaluran dana bergulir simpan pinjam perempuan oleh Unit Pengelola Kegiatan kepada Kelompok dan menganalisa pengaruh penyaluran dana terhadap perubahan pendapatan. Metode penelitian dengan Pendekatan deskriptif dengan analisa berdasarkan petunjuk teknis program PNPM-MP oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun, 2008 serta regresi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelompok SPP di Kecamatan V Koto Timur dengan anggota 74 orang pada 3 Nagari, dengan sampel sebanyak 30 orang. Hasil Penelitian dari sosialisasi yang memahami tentang maksud dan tujuan program PNPM-MP sebanyak 63,33% sedangkan 36,67% diantaranya tidak memahami, dari aspek penggunaan dana 70 % anggota kelompok penerima adalah rumah tangga miskin (RTM) dan 30% nya adalah bukan rumah tangga miskin (Non RTM). 66,67 % anggota kelompok penerima menyatakan dapat meningkatkan pendapatan 33,33% menyatakan tidak meningkat. Pengembalian dana memperlihatkan 83,33 % lancar dan 16,67% kurang lancar. Anggota yang memperoleh pinjaman (SPP), 80 % menyatakan usaha mereka mendapat pembinaan/ bimbingan dari tim teknis dan fasilitator. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan besarnya pemberian pinjaman dana bergulir SPP dalam peningkatan pendapatan anggota kelompok. Disarankan perbaikan dalam pelaksanaan dilapangan terutama dalam sosialisasi program kepada masyarakat, terutama kepada anggota kelompok dan agar pengurus lebih selektif dan lebih baik lagi dalam menyeleksi penerima pinjaman dalam menilai kelayakan usaha.

Keywords: National Program for Community Empowerment in Rural Areas (PNPM-MP), Women's Savings and Loans, use of funds/SPP, income

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui dana Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN), bantuan dari pihak lembaga swasta, maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat berusaha untuk menyusun berbagai program dan kebijakan yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat seluruh Indonesia. Demikian seriusnya permasalahan kemiskinan yang segera ditangani, membuat pemerintah berkonsentrasi penuh dalam membuat serta melaksanakan aturan kebijakan. Banyak upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sampai saat sekarang ini.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan dimulai Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di mana jangkauan programnya berakhir pada tahun 2006. Pada tahun 2006 Pemerintah menyepakati Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja sebagai lanjutan dari PPK dan pada tahun 2007 Presiden menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan untuk masyarakat daerah Kabupaten, PNPM Mandiri Perkotaan untuk masyarakat daerah Kota, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan dan PNPM Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah. PNPM Mandiri diharapkan dapat menjadi suatu program pembangunan yang dapat diakses secara adil dan merata oleh semua komponen masyarakat, karena program ini mempunyai prinsip bertumpu pada pembangunan manusia. (Petunjuk Teknis Operasional PNPM, 2008)

Program PNPM-MP dirancang sebagai bagian dari proses percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparatur, dengan memberikan modal usaha untuk

pengembangan usaha ekonomi produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi perdesaan. Program ini juga dirancang sebagai proses bagi masyarakat dan aparat melalui proses pengambilan keputusan yang demokratis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Pengelolaan program ini diberikan secara langsung kepada masyarakat dan dengan pengelolaan seperti ini diharapkan masyarakat dapat melaksanakannya dengan optimal. Artinya masyarakat diikutsertakan dalam setiap kegiatan. (Petunjuk Teknis Operasional PNPM : 2008)

Melalui PNPM-MP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari proses pembangunan sehingga masyarakat merasa memiliki hasil-hasil pembangunan, karena dari awal sampai akhir pelaksanaan program, masyarakat dilibatkan secara langsung sehingga masyarakat mengetahui proses pembangunan tersebut. Dengan adanya program PNPM-MP di pedesaan, diharapkan masyarakat menjadi mandiri dan mengetahui betapa pentingnya pembangunan wilayah di pedesaan yang berkelanjutan.

Program pemberantasan kemiskinan melalui pemberian pinjaman modal telah banyak dilakukan. Program tersebut mempunyai berbagai resiko, karena pembayaran kembali modal tidak dapat dijamin (Adams, 1984, Yaron, 1994) Kegagalan dalam pengembalian pinjaman disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat mengelola dana pinjaman. Disamping itu pemberian bantuan pada masyarakat miskin di pedesaan yang diperlukan adalah inovasi (pembaharuan) sistem institusional dengan mengkombinasikan prinsip-prinsip finansial yang hati-hati, strategi penyaringan dan pemantauan yang efektif

tidak didasarkan pada jaminan fisik (Sharma dan Zeller,1996). Salah satu kegiatan pada program PNPM-MP adalah kegiatan kelompok simpan pinjam perempuan yang belum pernah dievaluasi dimana penulis melihat tingkat perkembangan modalnya 14,39 % dan tingkat pengembalian pinjamannya sebesar 97,5 % , ini kondisi Desember 2012. Dananya berkembang sedangkan ada program yang lain ternyata bertolak belakang. Sehubungan dengan latar belakang yang demikian , penelitian tentang kebijakan pengelolaan PNPM-MP perlu dianalisa pelaksanaan penerapan dari program tersebut.

Program PNPM-MP dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2007 pada 5 Kecamatan (Pilot Project) dengan jumlah dana Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah). Pada tahun 2008 berganti menjadi PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang pada awal Kabupaten Padang Pariaman mendapat alokasi untuk 7 Kecamatan berubah menjadi 16 Kecamatan dengan pola khusus pasca bencana. Total alokasi pada tahun 2008 sebesar Rp. 44.500.000.000.- Pada tahun 2009 Kabupaten Padang Pariaman kembali ke pola Normal dengan alokasi sebesar Rp 17.700.000.000.- Terkait dengan bencana Gempa 30 September 2009 di Kabupaten Padang Pariaman maka tahun 2010 kembali diterapkan pola khusus dengan alokasi sebesar Rp.61.000.000.000.- Tahun 2011 pelaksanaan PNPM-MP di Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan alokasi sebesar Rp.13.350.000.000 dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 17.650.000.000.- Pelaksanaan program PNPM-MP sudah berjalan selama 5 tahun dari tahun 2007 s/d 2012 dan telah menyalurkan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) kepada masyarakat miskin. sebanyak Rp.159.200.000.000.- (Seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah), seperti lampiran I. Kegiatan program PNPM-MP antara lain adalah kegiatan Simpan pinjam perempuan dimana dana yang bergulir sampai akhir Desember 2012 modal awal berjumlah

Rp.27.437.664.500.- (dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan modal saat ini berjumlah Rp.33.166.604.852.- dengan total dana yang telah diberikan berjumlah Rp.94.896.863.700,- dengan tingkat pengembalian pinjamannya 96,5 % yang tersebar pada 16 Kecamatan dan 56 Nagari dengan jumlah Kelompok 977 kelompok . Salah satu Kecamatan dimana program PNPM dilaksanakan adalah Kecamatan V Koto Timur. Program PNPM di Kecamatan V Koto Timur dilaksanakan pada tahun 2008 s/d 2012 dengan jumlah dana bergulir SPP sebesar Rp.1.554.050.000, (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), persentase peningkatan modalnya 14,39 % dengan tingkat pengembaliannya 97,5% dan jumlah kelompoknya 54 Kelompok. Sedangkan di Kecamatan lain pada Kabupaten Padang Pariaman dengan petunjuk teknis operasional (PTO) yang sama contohnya di Kecamatan Batang Gasan dengan jumlah dana bergulirnya Rp.925.000.000.- (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) , dengan persentase peningkatan modalnya hanya 12.32 % dengan tingkat pengembalian nya 86.9 % dan jumlah kelompok sebanyak 30 kelompok. Artinya kenapa terjadi keadaan yang demikian , dengan Petunjuk yang sama ,prosedur yang sama ,program yang sama ,tetapi terjadi penunggakan dan kemacetan pengembalian dana sehingga berakibat pada persentase tingkat perkembangan modalnya.

Keberhasilan program PNPM simpan pinjam khusus perempuan tersebut, dibandingkan dengan program-program sebelumnya yang pernah dilaksanakan oleh Pemerintah seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT). Kredit Usaha Tani (KUT), PUAP, Kredit Mikro Nagari (KMN) dan program lainnya serta belum adanya yang menganalisa pelaksanaan program tersebut.

Pembangunan desa dalam pelaksanaan dikenal dengan konsep pembangunan masyarakat desa (PMD). Tujuan dari pembangunan desa adalah membantu

masyarakat desa dalam berbagai permasalahan yang dihadapi terutama dalam masalah perekonomian.. Dari sudut modernisasi desa dapat dikemukakan lima tujuan pembangunan desa yaitu : (Bintoro dalam Sartono, 2002:35)

1. Memberi gairah dan semangat hidup baru dalam kehidupan masyarakat desa sehingga warga desa tidak merasa jemu dengan lingkungannya.
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi warga desa sehingga dapat menahan arus urbanisasi.
3. Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan secara merata sehingga dapat mengurangi arus para pelajar ke kota dan tenaga terdidik akan tetap tinggal di desa membimbing warga desa lain yang belum maju.
4. Modernisasi di bidang pengangkutan akan secara berangsur angsur menghilangkan sifat isolasi desa.
5. Modernisasi merupakan tumpuan bagi pengembangan teknologi pedesaan dan dalam proses pengembangannya warga desa dapat diikutsertakan.

Berdasarkan Louis Helling, dkk (2005), bahwa elemen dari rencana pembangunan lokal adalah :

1. **Empowerment** (pemberdayaan) yaitu meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam membuat dan memutuskan langkah yang akan di ambil dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan personil dan masalah yang ada.
2. **Local Government** (pemerintah lokal), sebagai pemilik otoritas yang mempunyai kewenangan dalam merencanakan, pembuat keputusan dan pelaksanaan peraturan. Pemerintah lokal di sini bukan hanya pemerintah lokal secara struktur kenegaraan, tetapi juga institusi yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri.
3. **Local Service Provision System** (peraturan lokal), yang mengatur sumber daya hasil dan jasa serta fasilitas publik sebagai sumber dana pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan

4. **Enabling Local Private Sector** (dukungan bagi pertumbuhan sektorswasta) di mana terdapat kesempatan bagi pihak swasta untuk berperan aktif dalam perekonomian.

Pemberdayaan masyarakat (PM) merupakan komponen pokok dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional untuk mencapai peningkatan kapasitas dan sumber daya. Agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi riil yang terjadi, diperlukan masyarakat yang mengerti akan potensi dan masalah lingkungannya. Di samping itu juga diperlukan unsur lainnya untuk menentukan arah kebijakan pembangunan lokal.

Menurut Hall dan Midgley (2004 : 14) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi depriasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup dibawah standar kehidupan yang layak atau kondisi dimana individu mengalami depriasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

BPS dan Departemen Sosial yang dikutip Suharto (2005 : 13) mendefinisikan kemiskinan yaitu Kemiskinan merupakan kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (**poverty line**) atau batas kemiskinan (**poverty threshold**). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas menurut Ancok (1995), ada tiga pendekatan yang cukup populer dalam memahami kemiskinan yaitu ; **Pertama**, pendekatan **cultural** dengan konsep **cultural poverty** yang memandang kemiskinan sebagai suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi yang berlangsung lama, **Kedua**, pendekatan

situasional yang dibidangi oleh Valentine (1968) yang mengasumsikan bahwa masyarakat miskin timbul karena adanya struktur total dari sistem sosial yang ada didalam masyarakat yang menekan mereka (kemiskinan struktural), *Ketiga*, pendekatan interaksional dengan suatu asumsi bahwa sebagian orang miskin diakibatkan oleh warisan generasi sebelumnya dan sebagian yang lainnya hanya miskin secara priodik.

Pelekatan program/proyek dengan kondisi masyarakat memungkinkan penduduk miskin dan perempuan untuk memaksimalkan manfaat yang bisa mereka peroleh . Program/proyek semacam ini turut menggerakkan pemberdayaan masyarakat sehingga disebut sebagai program pemberdayaan (Chamber, 1988).

Ada beberapa faktor penting yang menyebabkan kesulitan dalam menilai dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia dan kebanyakan negara berkembang. Faktor tersebut antara lain adalah : tidak tepatnya dalam menetapkan sasaran, tidak sequence waktu program, kurang pahamiannya tenaga pemerintah dalam melaksanakan, termasuk korupsi, kurangnya persiapan tenaga dalam mendampingi program, kecilnya bentuk bantuan dan kurangnya informasi. Faktor-faktor tersebut masih belum ditemukenali untuk konteks Sumatera Barat, manakah diantara faktor tersebut yang dominan menjelaskan persoalan dari efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (Elfindri,1995).

Sudah banyak dana yang dikeluarkan untuk penduduk miskin agar keluar dari kemiskinannya. Namun seberapa besar manfaat yang diberikan oleh kebijakan program tersebut dalam menurunkan penduduk miskin dan apakah program-program kemiskinan tersebut sudah mencapai sasaran yang diharapkan yaitu penduduk yang benar-benar miskin atau sebaliknya program tersebut banyak dimanfaatkan oleh orang yang tidak miskin, belum banyak terungkap.

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropah mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat. Ife (1995) menyatakan bahwa :

“ Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, angaging in political action, understanding how to “work the system,” and so on (Ife, 1995).

Definisi tersebut diatas mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Disisi lain Paul (1987) dalam Priyono dan Pranaka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Menurut Hadi (2011), pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, menurut Sumodiningrat,(cit.Hadi,2011)

pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut : pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu , sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mencakup : (1) berkurangnya jumlah penduduk miskin dan berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan ditandai oleh peningkatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya (2) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungkannya serta meningkatkan kemandirian kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistim administrasi kelompok (Gunawan.1999).

Setiap upaya ekonomi masyarakat perlu dilakukan secara terpadu dan meliputi berbagai program pemberdayaan

baik sektoral maupun regional. Dalam tataran mikro model pemberdayaan sebagai dasar penanggulangan kemiskinan telah dikembangkan oleh LSM, perguruan Tinggi dan organisasi kemasyarakatan ternyata sangat efektif untuk mengatasi upaya yanag dilakukan melalui berbagai program pembangunan (Topan,2002).

Secara umum dana bergulir (revolving fund) diartikan sebagai dana yang disediakan oleh pemerintah atau pihak tertentu untuk dipinjamkan kepada masyarakat melalui ikatan perjanjian yang digunakan sebagai penguatan modal dalam rangka meningkatkan usaha masyarakat . Dana tersebut wajib dikembalikan selama jangka waktu yang ditentukan, selanjutnya akan dipinjamkan /digulirkan kepada kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan modal usaha (Pedoman Umum P2KP,2005)

Kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi rumah tangga miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan/SPP. Disini pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari unit pengelola kegiatan yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.(PTO PNPM-MP, Departemen Dalam Negeri RI, 2008).

Pada program PNPM-MP bantuan modal yang diberikan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada masing-masing kelompok simpan pinjam setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan. Artinya dana yang diberikan oleh UPK langsung diterima oleh ketua kelompok dan seterusnya diserahkan kepada anggota kelompok yang diketahui dan disaksikan oleh Tim Pengelola Kegiatan yang ada pada masing-masing Korong. Anggota kelompok yang meminjam dana bergulir harus mengembalikan ke UPK dengan cara mencicil/kredit. Dari hasil pencicilan tersebut dapat digulirkan lagi kepada kelompok lain yang membutuhkan. Bila

hal ini berjalan dengan baik maka tujuan program PNPM-MP khususnya simpan pinjam perempuan/SPP untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan usaha dipedesaan akan tercapai.

Dana bergulir adalah Dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. (Permenkeu Nomor 218/PMK.5/2009). Dana bergulir Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat (*revolving fund*) Begulir/berputar mengandung dua makna yaitu a) dana tersebut harus selalu berputar (tidak berhenti) dalam aktivitas individu atau kelompok yang dapat memanfaatkan melalui kegiatan yang bersifat produktif; b) Pengertian yang lebih luas dana tersebut harus selalu berputar untuk dapat dimanfaatkan secara bergulir dari individu atau kelompok yang lain (Suprpto, 1999: 23).

Mengukur dampak pelaksanaan program harus memperhatikan beberapa ukuran sesuai dengan tujuan dari penetapan program. Untuk konteks program PNPM-MP , maka evaluasi program dapat dilihat dari : a) komponen tujuan b) komponen outcome dari masing-masing kegiatan. Selain itu komponen yang akan dianalisa dapat berupa antara konsep dengan pelaksanaan dalam kaitan ini yang dinilai adalah manajemen program. Untuk mengukur manfaat program dapat dilihat dari beberapa dimensi diantaranya adalah a) perubahan penghasilan b) perubahan pemakaian tenaga kerja c) peningkatan investasi d) peningkatan skala usaha (Elfindri, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif, Pendekatan ini diarahkan pada latar

belakang program dan individu tersebut secara holistik (utuh). salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif yaitu data yang dihasilkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa masa sekarang (Nazir, 2003).

Analisa rogram PNPM-MP khususnya Dana Simpan pinjam perempuan oleh Dinas Instansi terkait, hanya berupa laporan tiap bulan dan daerahnya terisolir. Penelitian ini dilatar belakangi karena kelompok Simpan Pinjam Perempuan merupakan salah satu yang maju dan berkembang pada program PNPM-MP , dapat dilihat pada tingkat perkembangan kembalikan aset dan tingkat kembalikan ekuitas , pada lampiran 1 dan 2 (Tim Koordinasi PNPM-MP Kabupaten Padang Pariaman).

Fokus evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penyaluran dana bergulir simpan pinjam perempuan program PNPM-MP ditetapkan berdasarkan buku petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM-MP yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM (TK PNPM Mandiri Pedesaan, Jakarta, 2008).

Ketentuan yang dipedomani dalam menganalisa berdasarkan petunjuk teknis program PNPM-MP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, 2008.

Berdasarkan pedoman PNPM-MP, maka kriteria yang digunakan untuk menganalisa pelaksanaan program PNPM-MP yang salah satu kegiatannya adalah dana bergulir simpan pinjam perempuan /SPP adalah :

- 1 Sosialisasi
- 2 Penggunaan dana bergulir
- 3 Manfaat dana
- 4 Pembinaan
- 5 Monitoring
- 6 Sasaran/penerima dana
- 7 Pengembalian dana bergulir

Pengumpulan data pada penelitian ini mencakup data primer dan data skunder. Data skunder diperoleh dari survey awal pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB Kabupaten Padang Pariaman dan data dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Data Unit Pengelola Kegiatan yang dikumpulkan adalah data unit pengelola kegiatan mulai berdiri tahun 2008 sampai dengan 31 Desember 2012.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelompok SPP di Kecamatan V Koto Timur pada tahun 2012 berjumlah 5 Kelompok dengan anggota 74 orang yang tersebar pada 3 nagari di Kecamatan V Koto Timur.

Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster sampling, Dalam cluster sampling satuan-satuan sampel tidak terdiri dari individu-individu melainkan dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Pada penelitian ini cluster yang dimaksud adalah Nagari. Populasi pada masing – masing nagari terdistribusi tidak merata, maka pada masing-masing nagari diambil sampel secara proporsional. Pada penelitian ini sampel penelitian sebanyak 20-40 % (Arikunto Suharsini, 1989) dengan jumlah sampel 30 orang.

Menganalisa penyaluran dan pengembalian dana pada masing-masing kelompok dengan melihat keterkaitan nilai penyaluran dan tingkat perubahan pendapatan, jenis usaha yang dikelola serta rumah tangga penerima maka dapat disimpulkan keterkaitan masing-masingnya dan pencapaian pengelolaan terhadap pelaksanaan program PNPM-MP dan penyaluran dana bergulir (SPP).

Sementara untuk melihat pengaruh besarnya pemberian pinjaman terhadap peningkatan pendapatan digunakan analisa regresi dan korelasi.

PEMBAHASAN

1. Sosialisasi

Sosialisasi PNPM-MP kepada masyarakat pada masing-masing Korong di Nagari dalam Kecamatan V Koto Timur, dilakukan oleh Tim Teknis Kecamatan (PJOK, Fasilitator, Camat dan lembaga lembaga yang dibentuk dalam program

PNPM-MP) serta dihadiri oleh Tim Teknis Kabupaten. Sosialisasi dilakukan pada musyawarah desa pada masing-masing Korong di Nagari dalam Kecamatan V Koto Timur, di fasilitasi oleh kepala desa , aparat desa dengan mengundang Toko masyarakat kampung, Ketua LPM, Alim ulama, cadiak pandai dan Ketua pemuda, wakil perempuan dan wakil RTM desa, yang dihadiri oleh Camat, Fasilitator dan PJOK.

Responden , yang memahami tentang maksud dan tujuan program PNPM-MP sebanyak 63,33% sedangkan 36,67% diantaranya tidak memahami. Indikator responden yang memahami adalah responden yang mampu menjelaskan dengan baik maksud dan tujuan adanya program PNPM-MP dimana di dalam program PNPM-MP itu salah satu kegiatannya adalah simpan pinjam perempuan/SPP.

Pemahaman anggota kelompok terhadap maksud dan tujuan program dana SPP juga belum maksimal, namun sedikit lebih baik dari PNPM-MP dimana mencapai 76,66% dan sisanya 23,34% yang tidak memahami.

Belum maksimalnya pemahaman terhadap program PNPM-MP dan dana SPP disebabkan masih terdapat anggota kelompok tidak pernah menghadiri sosialisasi, sebesar 13,33%. Ketidakhadiran tersebut dikarenakan anggota masing-masing kelompok tidak mau meninggalkan pekerjaan rutinnya sebagai petani, jualan, pedagang dan menjahit. Hal ini disebabkan para anggota cenderung tidak mengikuti karena takut rugi, sehingga kalau dianggap sosialisasi tersebut tidak menguntungkan/ menghasilkan baginya maka tidak menghadiri undangan tersebut. Sementara jawaban lainnya adalah dikarenakan sakit, rumah tidak ada yang menunggu, sementara informasi dapat ditanyakan dengan anggota lainnya.

Selain hal tersebut tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat pemahaman anggota kelompok terhadap maksud dan tujuan Program PNPM-MP dan SPP. 40% dari anggota kelompok PNPM-MP dan SPP dengan tingkat pendidikan SMA.

Tingkat pendidikan SMP dan SD masing-masingnya 23,3% dan 33,34%.

Tabel 1. Data Persentase Jumlah Responden yang Memahami Program PNPM-MP dan Dana SPP

Sampel Kelompok	Maksud & Tujuan Dana SPP (org)			
	PNPM-MP (org)			
Lima Purut Kr. Padang Kajai	6	4	2	5
Kudu Ganting				
Kr. Kp. Pili	6	4	2	5
Kr. Kampung. Parit	6	3	3	5
Korong Pasa Kudu	6	4	2	4
Padang Alai Kr. Koto Tinggi	6	4	2	4
Jumlah	30	19	11	23
Prosentase	100%	63,33%	36,67%	76,66%

Selain hal tersebut tingkat umur juga mempengaruhi tingkat pemahaman anggota kelompok terhadap maksud dan tujuan Program PNPM-MP dan SPP. 40% dari anggota kelompok PNPM-MP dan SPP dengan tingkat umur sampai dengan 40 tahun. Umur diatas 40 tahun sebanyak 60%.

Belum maksimalnya pengetahuan anggota kelompok terhadap PNPM-MP dan SPP karena sosialisasi yang dilakukan fasilitator PJOK (Tim Teknis Kecamatan) relative sulit melakukan pendekatan kepada anggota yang disibukan kegiatan rutin sebagai pedagang, berjualan, menjahit dan bertani, begitu juga UPK dan Dinas terkait.

2. Penggunaan Dana

Penggunaan dana untuk membangun atau mengembangkan usaha yang produktif. Penggunaan dana harus sesuai dengan proposal yang telah diajukan. 70 % anggota kelompok penerima PNPM-MP dan SPP adalah rumah tangga miskin (RTM) dan 30% nya adalah bukan rumah tangga miskin (Non RTM). Pada tiga Korong, yaitu korong Koto Tinggi Padang Alai, Korong Pasa Padang Alai dan Kp. Parit Kudu ganting.

Dilihat dari kesesuaian dengan penggunaannya secara keseluruhan (100%) sesuai dengan proposal yang diajukan, dengan kata lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga hal tersebut menggambarkan bahwa pengurus melakukan seleksi terhadap proposal yang

akan disetujui agar sesuai dengan pelaksanaannya.

3. Manfaat Penggunaan Dana

Penggunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk membangun atau mengembangkan usaha yang produktif

66,67 % anggota kelompok penerima dana bergulir SPP program PNPM-MP menyatakan dapat meningkatkan pendapatan dan selebihnya 33,33% menyatakan pendapatan tidak meningkat. Peningkatan pendapatan responden karena mereka dapat menambah persediaan barang dalam usaha dagangnya sehingga dapat menurunkan harga pembelian saat membeli dengan jumlah yang lebih banyak, Sehingga fluktuasi kenaikan harga barang dapat disesuaikan ketika melakukan penjualan. Begitu juga pada beberapa petani dapat meningkatkan bibitnya sehingga dapat meningkatkan hasil panennya.

Dilihat pengelompokkan perubahan pendapatan 66,67%, hanya 1 orang dengan perubahan Rp. 750.000/ bulan, sementara yang lainnya relative rendah yaitu dengan rank Rp. 135.000 – Rp.450.000 sebanyak 19 orang sementara tidak terjadi peningkatan pendapatan sebanyak 33,33%. Sementara responden tersebut yang menyatakan usahanya berkembang 43,33% dan 56,67% tidak berkembang. Rendahnya prosentase usaha anggota kelompok berkembang karena diantara petani terdapat petani yang memiliki luas lahan yang terbatas sehingga

tidak dapat meningkatkan hasil produksinya.

Sementara terdapat anggota yang usaha dagang dan jualan juga mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya dikarenakan ada yang menggunakan dana bergulir untuk perbaikan tempat usaha dan ada yang menggunakan untuk sarana penunjang yang kurang produktif dalam jangka pendek, begitu juga terdapat anggota dengan usaha menjahit, kurang dapat meningkatkan kreativitas dalam melakukan diversifikasi terhadap hasil jahitannya dan juga dalam memperluas pasarnya.

Namun walaupun adanya usaha anggota yang tidak berkembang, mereka sangat merasakan manfaat pinjaman dana bergulir tersebut, karena selama ini petani, pedagang yang dengan usaha relative kecil dan bordir serta menjahit dapat bebas dari pinjaman rentenir/tengkulak.

4. Pengembalian Dana

Dana bergulir SPP yang dipinjamkan wajib dikembalikan agar dapat digulirkan lagi kepada anggota yang lain yang membutuhkan. Pengembalian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dari pengembalian dana memperlihatkan 83,33 % anggota kelompok penerima dana bergulir SPP program PNPM-MP dalam pengembalian lancar sementara 16,67% kurang lancar. Pengembalian dana pinjaman. Bila dilihat dari jenis usahanya dimana jualan dari 92,86% lancar dan 7,14% yang tidak lancar. Jenis usaha pedagang sebanyak 26,66%, lancar sisanya 73,34% yang kurang lancar dalam pengembaliannya. Jenis usaha tani 13,34%, yang mengembalikan pinjaman lancar. sedangkan jenis usaha border dan menjahit masing-masingnya kesemuanya (100%) lancar dalam pengembalian.

Kurang lancarnya anggota kelompok pengembalian tersebut diantaranya: Usaha mengalami penurunan penerimaan, terpengaruh dengan teman yang tidak membayar, menganggap dana tersebut adalah bantuan lepas. Ada juga yang tidak membayar karena dipakai

untuk keperluan sekolah anak (Wawancara dengan Ketua Kelompok, Januari,2014).

5. Pembinaan

Pembinaan dilakukan oleh Fasilitator PJOK, UPK Camat terhadap anggota kelompok. Yang mendapatkan pinjaman modal (SPP). Pembinaan ini rutin dilakukan selama kegiatan melakukan usahanya.

Kegiatan bimbingan yang dilakukan tim teknis dalam melakukan kunjungan serta bimbingan yang dilakukan oleh fasilitator kepada anggota yang memperoleh pinjaman (SPP), 80 % menyatakan usaha mereka mendapat pembinaan/ bimbingan dari tim teknis dan fasilitator. Sebesar 20,0% menyatakan tidak memperoleh bimbingan kendala bimbingan terjadi tidak sesuai pendapat yang disampaikan tim teknis ataupun fasilitator dengan pemikiran anggota sehingga hanya didengarkan saja oleh anggota tetapi tidak dilaksanakan, disamping itu fasilitator juga kadang kala dianggap anggota tidak memahami bidang pedagang, atau pun bidang usaha mereka, yang kadangkala dianggap hanya sebagai teori saja.

Analisa Penyaluran Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

Analisa terhadap Penyaluran Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Non Rumah Tangga Miskin (Non RTM), berdasarkan jenis usaha besarnya pinjaman yang diterima dengan kenaikan terhadap pendapatan perbulan dari sampel pada masing-masing kelompok pada masing-masing Korong di Nagari dalam Kecamatan V Koto Timur

Dominan pinjaman dilakukan oleh Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 70% sementara Non RTM sebanyak 30%, dari 70% tersebut terdapat 38,09 % yang tidak dapat meningkatkan pendapatannya sedangkan 61,91% dapat meningkatkan pendapatannya, sedangkan dari Non RTM

tersebut terdapat 22,22%, dan 77,78% dapat meningkatkan pendapatannya. secara umum program tersebut dapat dinyatakan berhasil meningkatkan pendapatan Rumah Tangga miskin dan Rumah Tangga miskin non miskin.

Dilihat dari alokasi pinjaman yang disalurkan pada KSSP pada PNPM-MP pada Korong Koto Tinggi Padang Alai (Teluk Bayur) sebesar Rp. 12.500.000. dengan rank pinjaman Rp. 1.000.000 – Rp.1.500.000 dapat meningkatkan pendapatan 66,67% anggota perbulan Rp. 750.000 dan Rp. 375.000 pada usaha bordir sedangkan untuk usaha jual kelapa Rp.300.000 dan tani Rp. 135.000. Pada Korong Kp. Pili Kudu ganting (Semoga Jaya) alokasi pinjaman sebesar Rp. 20.000.000. dengan rank pinjaman Rp. 1.000.000 – Rp.2.000.000 Pada Kp. Parit Kudu ganting (Anggrek) alokasi pinjaman sebesar Rp. 15.000.000. dengan rank pinjaman Rp. 1.000.000 – Rp.2.000.000 dapat meningkatkan pendapatan anggota perbulan (50 %) masing-masing Rp. 450.000 dan Rp. 150.000 pada usaha perdagang.

Pada Pasa Balai Kudu ganting (Kudu Bersama) alokasi pinjaman sebesar Rp. 56.500.000. dengan rank pinjaman Rp. 4.000.000 – Rp.5.000.000 sampel dapat meningkatkan pendapatan anggota perbulan (50 %) masing-masing Rp. 450.000 dan Rp. 150.000 pada usaha perdagang. Meningkat pendapatan anggota perbulan (50 %) masing-masing Rp. 450.000 pada usaha jualan, pedagang dan menjahit.

Pada Korong Padang Kajai Limau Purut (Melati) alokasi pinjaman sebesar Rp. 58.000.000. dengan rank pinjaman Rp. 2.000.000 – Rp.3.000.000 pada masing-masing anggota. sampel yang dapat

meningkatkan pendapatan anggota perbulan masing-masing Rp. 1500.000 dan Rp. 300.000 pada usaha jualan. Dari gambaran tersebut peningkatan pendapatan anggota pada masing-masing Korong di Nagari dalam Kecamatan V Koto Timur tidak tergantung dengan besarnya nilai pinjaman, jenis usaha ataupun Rumah Tangga Miskin (RTM) ataupun Non RTM.

Analisa terhadap Penyaluran Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, terhadap jumlah pinjaman dan pengembalian dana.

pada saat jatuh tempo dari pinjaman yang diberikan tingkat pengembalian dengan rank 98,4 % - 100,0 %, walaupun pada awalnya terdapat 5 orang (16,67%) dari sampel yang kurang lancar, namun relative kecil dana yang belum di lunasi pada masing-masing kelompok. Pengembalian yang kurang lancar terjadi dikarenakan tahap awal pengurus juga belum mengenal watak/karakter peminjam, namun dengan sikap bila salah satu anggota kelompok bernasalah atau dianggap kurang lancar dalam pengembalian maka dianggap semua anggota kelompok bermasalah, sampai adanya penyelesaian pengembalian dari yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar anggota lain mendorong anggota yang kurang lancar untuk segera menyelesaikannya

Belum secara keseluruhannya (100%) pada akhir periode jatuh tempo semua kelompok melunasinya dikarenakan pengurus masih belum secara tegas menindak namun masih memberikan toleransi terhadap anggota yang belum melunasinya.

Pengaruh Pinjaman Terhadap Peningkatan Pendapatan

Tabel 2. Korelasi & Determinasi

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change
1	,278 ^a	,077	,044	218,448	,077	2,3	1	28	,137

a. Predictors: (Constant), Besar Pinjaman

Dari tabel diatas terlihat rendahnya hubungan antara besarnya pinjaman dengan peningkatan pendapatan anggota kelompok yang menerima pinjaman sebesar 0,278 dengan kontribusi pengaruh sangat kecil hanya sebesar(adjusted R²)

sebesar 0,044 atau 4,4%. Dari Nilai Koefisien Regresi dapat dilihat nilai pengaruh seperti tabe dibawah ini:

Tabel 3. Regresi Besar Pinjaman Terhadap Peningkatan Pendapatan

Coefficients ^{a,b}					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	124,968	74,925		1,668
	Besar Pinjaman	,425	,278	,278	1,530

a. Dependent Variable: Peningkatan Pendapatan

b. Footnote

Dari tabel diatas persamaan regresi yang dihasilkan :

$Y = 24,968 + 0,425X$. Dengan koefisien regresi sebesar 0,425 nilai sig. 0,137 > 0,05 yang berarti tidak signifikan. Sehingga dapat dinyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan besarnya pemberian pinjaman dana bergulir SPP dalam peningkatan pendapatan anggota kelompok SPP di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

Mencermati kuota lokasi Kecamatan V Koto Timur dengan alokasi dana 1.554,050.000 dengan jumlah kelompok SPP sebanyak 62 kelompok, dimana Total modal yang dimiliki sampai dengan tahun 2012 sudah mencapai 1.777.730.728 dengan tingkat perkembangan 14,39% menggambarkan perkembangan yang baik, namun dari hasil penelitian memperlihatkan 70,0% responden menyatakan tidak terjadinya perkembangan usaha responden dan begitu juga 33,33% menyatakan tidak terjadi peningkatan pendapatan, sementara tujuan program adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu

meningkatkan metoda penyaluran dana dengan cara peningkatan nilai pinjaman dengan mengukur nilai kebutuhan/ volume usaha dalam meningkatkan usaha anggota kelompok yang sebanding dan kembali mempertimbangkan verifikasi kelayakan kelompok sehingga Rumah tangga miskin (RTM) yang melakukan peminjaman dapat keluar dari kemiskinan tersebut.

Perlunya Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam melakukan pinjaman sebagaimana prinsip-prinsip PNPM, dengan mempertimbangkan kemendesakkan, kemanfaatan dalam membantu untuk mengeluarkan dari kemiskinan melalui kebijakan hanya pengembalian cicilan pokok dengan pembebasan biaya yang ditimbulkan (jasa) dalam jangka waktu tertentu, dengan monitoring yang relatif ketat.

Kebijakan selanjutnya adalah pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yakni meningkatkan pengetahuan anggota kelompok dan pengurus dalam mengelola, dan juga meningkatkan pengetahuan tim teknis maupun fasilitator.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sosialisasi Program PNPM-MP dana bergulir SPP belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umumnya dan khususnya anggota kelompok, terbukti dari jawaban responden hanya 63,33% yang mengetahui tujuan dan maksud PNPM-MP sedangkan untuk dana bergulir SPP sebesar 76,66%.
2. Pelaksanaan Program PNPM-MP dana bergulir SPP belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rendahnya implementasi program ini terlihat dari data bahwa hanya 30,0% usaha responden yang berkembang walaupun ada peningkatan pendapatan sebesar 66,67%. Hal ini terjadi dikarenakan pedagang/ jualan tidak menggunakan kepada peningkatan barang atau hal yang produktif tetapi kepada perbaikan tempat usaha dan pembelian asset, sementara bagi petani tidak adanya perubahan lahan begitu juga usaha menjahit tidak terjadi penambahan tenaga kerja dan mesin ketika mendapatkan dana bergulir SPP pada program PNPM-MP.
3. Pelaksanaan penyaluran dana bergulir yang dapat membantu untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan ternyata tidak tercapai secara maksimal terlihat dari peminjaman oleh responden yang merupakan rumah tangga miskin (RTM) hanya 70,0%, sementara non RTM 30,0%. Walaupun dari aspek kelancaran pengembalian tercapai 83,33% dengan kondisi kurang lancar 16,73%, namun bila dicermati kemacetan yang terjadi pada jenis usaha jualan, pedagang dan tani sementara bordir dan menjahit tidak mengalami kemacetan.
4. Berdasarkan jenis usaha besarnya pinjaman yang diterima dengan kenaikan terhadap pendapatan perbulan dari sampel pada masing-masing kelompok pada masing-masing Korong di Nagari dalam Kecamatan V Koto Timur. Terlihat dominan pinjaman dilakukan oleh Rumah Tangga Miskin (RTM) sebesar 70% sementara Non RTM sebesar 30%, dari peningkatan pendapatannya 38,09 % yang tidak dapat meningkatkan pendapatannya sedangkan 61,91% dapat meningkatkan pendapatannya. secara umum program tersebut dapat dinyatakan berhasil meningkatkan pendapatan Rumah Tangga miskin dan Rumah Tangga miskin non miskin.
5. Penyaluran Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, terhadap jumlah pinjaman dan pengembalian dana, relative kecil dana yang belum di lunasi pada masing-masing kelompok. Pengembalian yang kurang lancar terjadi dikarenakan tahap awal pengurus juga belum mengenal watak/karakter peminjam. Belum secara keseluruhannya (100%) pada akhir periode jatuh tempo semua kelompok melunasinya dikarenakan pengurus masih belum secara tegas menindak namun masih memberikan toleransi terhadap anggota yang belum melunasinya.
6. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan besarnya pemberian pinjaman dana bergulir SPP Terhadap peningkatan pendapatan anggota kelompok SPP di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

Saran-saran

- Untuk terlaksananya program PNPM-MP dana bergulir SPP di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, perlu diadakan perbaikan dalam pelaksanaan dilapangan terutama dalam sosialisasi program kepada masyarakat terutama kepada anggota kelompok. Disamping itu perlu meningkatkan pembinaan , pembimbingan dan pengawasan oleh tim teknis dan fasilitator.
2. Perlu peningkatan pengetahuan tenaga teknis maupun fasilitator dibidang marketing, dan pertanian sehubungan dengan dominannya anggota kelompok dengan kegiatan usaha dibidang perdagangan.

3. Dalam penyaluran dan bergulir SPP, disarankan agar pengurus lebih selektif dan lebih baik lagi dalam menyeleksi penerima pinjaman dalam menilai kelayakan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

10.22202/economica.2015.v3.i2.252

- Agusta, I. 2002. Metode Evaluasi Program Pemberdayaan.
- Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta : Penerbit Pancur Siwah.
- Arikunto, Suharsini, (1989) Manajemen Penelitian, Departemen P dan K, Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 1999. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonominya 1996-1999. Jakarta
- Baker, Judy L, 2000. Evaluating the Impact of Development Project on Poverty A Hand Book for Practitioners dalam Davy Hendri, Studi Evaluasi Program Penanggulangan Kasus KEP balita (JPS-BK) di Kota Padang . (Unand : Tesis PPN)
- Badan Pusat Statistik, 2007. Statistik Indonesia 2007, Jakarta
- Bappenas, 2004. Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Penerbit Ekonesia. Yogyakarta.
- Caslay, Dennis J dan Khrisna Kumar (1991). Pemanfaatan dan evaluasi Proyek Pertanian, Terjemahan Jakarta UI.
- Chambers, R. 1998. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. Terjemahan. Jakarta LP3ES.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen dalam Negeri. 2008
- Esmara, Hendra, 1996. Perencanaan dan Pembangunan Indonesia. PT Gramedia Jakarta.
- Elfindri, 2005, Kajian Tingkat Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan Sumatera Barat, Pemerintah propinsi Sumatera barat, Lembaga pengkajian Ekonomi Pembangunan (LPEP), fakultas ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Hadi, Sutrisno. 2000. Metodologi Research. Penerbit Andi Yogyakarta
- Helling, Louis, Serrano, Rodrigo, Warren, David, 2005, Governance and Public Service Provision Trough a Local Development Framework, Community Driven Development, World Bank Discussionpaper 0535
- Idris, Syafrizal (2006) Implementasi kebijakan dana bergulir dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kota solok, Tesis pascasarjana Universitas Andalas padang. Tidak diterbitkan
- Irwan. 1992 .Ekonomi Pembangunan. Edisi V. BPPE. Yogyakarta
- Jamasy, Owin. 2004. Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Balantika. Jakarta.
- K, Ginanjar (1996) . Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. PT. Pustaka Gresindo. Jakarta.
- Lincoln Arsyad ,(2008), Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja, & Sustainabilitas, Jakarta
- Nawawi. Hadari (2003). Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nasha, Ressa E. 1998. Evaluasi program Zakat di Kota Padang terhadap Pemberdayaan masyarakat, Tesis pascasarjana Unand, tidak diterbitkan
- Pedoman Umum Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan tahun 2005.
- Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP . tahun 2008.
- Prijono dan Pranata, 1996. Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi CSIS Jakarta
- Riduwan. 2010. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Alfabeta Bandung
- Sirait, Martin dan Aji Firman. 1990. Perencanaan dan Evaluasi Suatu Sistem untuk perencanaan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sartono, 2002 . Analisis Penentuan Prioritas Program Pembangunan di Kota Surakarta tahun 2001

- (Penerapan Metode Analisis Hierarchy Proses) , Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta,
- Singarimbun,masri dan Effendi, Syofyan.1989.Metode Penelitian Survey.LP3ES.Jakarta.
- Syahrial,(2008). Efektifitas Modal dana bergulir dalam program penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Studi Kasus Program PenanggulanganKemiskinan di kota padang,Tesis Pascasarjana Universitas Andalas Padang.Tidak diterbitkan.
- Sharma, Z. 1996. Growth Income Distribution and Equitty Oriented, Development Strategies, World Development , Vol. 3 no 2 dan 3 February dan Maret
- Suharto, E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D. Penerbit : Alfabeta Bandung
- Topan E.P Muhammad (2002). Analisis Program Dana Bergulir (revolving fund) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di kabupaten Solok (Tesis PWD Unand 2002)
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwijoto, 2007. Manajemen pemberdayaan :Sebuah pengantar dan panduan untuuk pemberdayaanmasyarakat.Jakarta PT Gramedia.